

Dalam setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan eksternalitas, maka para pelaku diberikan pilihan atau diwajibkan untuk membayar dampak tersebut (JJ Arrow, 1969). Misalnya dengan mengubah metode produksinya sehingga dapat menghilangkan atau meminimalisir dampak negatifnya (Lihat misalnya Kenneth J, Arrow, 1969).

Eksternalitas tidak selalu berdampak negatif. Eksternalitas positif yang sering digunakan sebagai contoh misalnya program imunisasi.

Karena telah dimunisasi akan menimbulkan rasa aman atas dampaknya.

tersebut. Akan ada kerugian ekonomi dan non ekonomi bagi masyarakat yang disebabkan bukan oleh mereka.

Contoh lain eksternalitas adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh aktifitas pabrik disekitar hunian masyarakat. Dampak dari pencemaran udara antara lain dapat mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat terkena dampaknya. Eksternalitas tidak selalu berdampak negatif. Eksternalitas positif yang sering digunakan sebagai contoh misalnya program imunisasi. Karena telah dimunisasi akan menimbulkan rasa aman atas dampaknya.

Dalam setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan eksternalitas, maka para pelaku diberikan pilihan atau diwajibkan untuk membayar dampak tersebut (JJ Arrow, 1969). Misalnya dengan mengubah metode produksinya sehingga dapat menghilangkan atau meminimalisir dampak negatifnya (Lihat misalnya Kenneth J, Arrow, 1969). Implikasinya pabrik yang membuang limbahnya ke sungai diwajibkan membuat pemurnian limbahnya sebelum dibuang ke sungai.

Untuk menanggulangi dampak eksternalitas kegiatan ekonomi dapat dilakukan baik oleh pelaku ekonomi maupun pemerintah. Dalam kasus pencemaran air sungai misalnya pemilik pabrik yang harus bertanggung jawab. Pemerintah selaku pemungut pajak juga dapat berperan dengan turut serta membangun sistem drainase yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> Dengan beberapa penyesuaian artikel ini telah dimuat di Harian Kompas tanggal 2 April, 2020

## Pandemi Covid-19

Mungkin akan dipertanyakan apakah eksternalitas relevan dikaitkan dengan Covid-19. Sebab Covid-19 bukan buatan pabrik. Lain halnya seperti kasus turbin bertenaga nuklir yang menimbulkan radiasi. Covid-19 yang bermula dari Wuhan di Cina menyebar luas ke berbagai negara.

Apakah fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dikaitkan dengan pendekatan eksternalitas? Dalam beberapa hal ada benang merahnya. Pertama bagi kantor, pusat pembelajaran, pusat wisata, rumah sakit dan fasilitas lainnya seperti transportasi publik yang tidak menyiapkan pencegahan dini dapat dikategorikan sebagai pihak yang “berpeluang” meningkatkan penyebaran Covid-19. Kedua, karena semua fasilitas tersebut dalam kelolaan pemerintah, maka ada bentuk tanggung jawab pemerintah. Paling tidak apabila pemerintah lalai atau terlambat memberlakukan kesiagaan serta mengatasinya pandemi Covid-19.

Sekalipun teori eksternalitas inspirasinya berasal dari kasus pencemaran lingkungan, bukan berarti pandemi Covid-19 dapat dikecualikan. Secara langsung maupun tidak langsung pelaku ekonomi dan pemerintah harus turut bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah dalam bentuk apa?

Sebenarnya terlepas apakah harus ada pembuktian terkait eksternalitas, sudah seharusnya semua pihak turut bertanggung jawab. Pihak pemerintah menerima pajak dari pelaku usaha dan lainnya dapat mengalokasikan dananya untuk pandemi Covid-19 dari pajak. Pihak pelaku ekonomi lainnya dapat berpartisipasi dalam bentuk kepedulian sosialnya (*corporate social responsibility*). Beberapa hal memang sudah dilakukan, termasuk yang terakhir adalah memberlakukan bekerja dari rumah (BDR). Namun karena ada pengecualian yang tidak dianjurkan BDR, maka ada tanggung jawab tambahan bagi pemberi kerja. Misalnya bagaimana bagi yang harus tetap masuk dan kemudian tertular dan dinyatakan positif Covid-19?

### Beberapa Catatan

Sekalipun teori eksternalitas inspirasinya berasal dari kasus pencemaran lingkungan, bukan berarti pandemic Covid-19 dapat dikecualikan. Secara langsung maupun tidak langsung pelaku ekonomi dan pemerintah harus turut bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah dalam bentuk apa?

Pertama, yang harus dilakukan adalah dalam hal manajemen penanggulangannya. Keluarannya adalah memberikan informasi yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan disertai penyampaian yang tidak menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran masyarakat. Termasuk mengendalikan *hoax* dan sangsinya. Secara akumulasi pemerintah harus membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa penanganan pandemic Covid-19 telah dilakukan dengan benar. Ada baiknya dalam satu komando agar ada rujukan yang kredibel bagi masyarakat. Cepat, dapat dipercaya dan disampaikan dengan kondusif.

Kedua, meningkatkan ketersediaan bahan pokok, obat-obatan, dan menambah rumah sakit rujukan lebih banyak. Ini dalam rangka memberikan kepastian dan ketenangan masyarakat. Masalahnya apabila untuk aksesnya terbatas. Misalnya untuk berbelanja diperlukan masker, pencuci tangan dan bahkan mungkin alat khusus lainnya. Tujuannya agar tidak

menularkan atau tertular Covid-19. Jalan pintasnya mengadakan semacam kegiatan khusus untuk mendekatkan akses kepada masyarakat. Kalau di bank ada Kas Keliling, mungkin untuk penanganan bisa membuat Posko Kesehatan Keliling seperti halnya mudik lebaran. Kelihatannya sederhana, tetapi bisa menjadi bagian untuk meningkatkan rasa aman. Bisa saja diartikan bagian dari kepanikan. Lupakan itu. Niat baik kalau dilakukan pasti akan mendapatkan tempat.

Ketiga, sarana yang cepat untuk melakukan kedua hal tersebut diatas bisa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pilihan ini bisa dalam satu komando dari Kementerian BUMN. Dalam hal tertentu BUMN sudah berpengalaman menangani hal-hal terkait tanggung jawab sosialnya seperti BUMN Peduli untuk bencana alam, mudik lebaran dan lain sebagainya. Bahwa BUMN harus menguntungkan tentunya tidak boleh diabaikan. Akan tetapi apabila BUMN berkontribusi untuk kepentingan masyarakat jelas bukan suatu kesalahan bahkan bagian dari suatu kewajiban, Hal lain yang menyebabkan BUMN lebih tepat untuk melakukannya karena hampir semua lini bisnis sudah dilakukan oleh BUMN.

Sekiranya mengkaitkan eksternalitas tidak relevan, tentu bukan berarti tanggung jawab pelaku ekonomi dan pemerintah tidak ada. Atau hanya mengatakan sudah ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Dalam kondisi darurat, seyogyanya tidak mengacu kepada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sukses pemerintah menangani pandemi Covid-19 ditunggu tidak saja masyarakat Indonesia. Tetapi juga oleh kalangan internasional-khususnya WHO yang pernah menyatakan agar Indonesia lebih serius lagi menangani pandemi Covid-19. Semoga kita dapat membuktikannya, Pasti bisa dan harus bisa.

Krisna Wijaya adalah Senior Faculty di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

